

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-66/BC/2025

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP
KESEMBILANBELAS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0, akan diterapkan secara penuh (mandatory) pada Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Pusat Logistik Berikat (PLB), Layanan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), Layanan Voluntary Declaration, Layanan Perijinan Prinsip, Layanan Perbendaharaan, Layanan Manifes, Layanan Barang Kiriman, dan Layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) ekspor pada dokumen BC 3.3, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengembangan sistem CEISA 4.0 berupa penerapan validasi ketentuan lartas ekspor pada dokumen BC 3.3;
- c. bahwa terhadap CEISA 4.0 Layanan Ekspor (validasi ketentuan lartas ekspor pada Dokumen BC 3.3) dan Layanan Perbendaharaan (billing, jaminan, piutang dan penagihan) telah dilakukan uji coba (piloting) pada Kantor Bea dan Cukai;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan CEISA 4.0 diperlukan ketentuan yang menetapkan mengenai penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0;
- e. bahwa telah dilakukan evaluasi pelaksanaan uji coba (Piloting) terhadap Kantor Bea dan Cukai secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2021 Tentang Pelaksanaan Piloting Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-124/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-218/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan Menu Jaminan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-87/BC/2023 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kesembilanbelas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2006 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 155/PMK.04/2022 Tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.04/2022 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai;

8. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-7/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Tempat Penimbunan Berikat;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-10/BC/2017 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Pusat Logistik Berikat Dalam Rangka Ekspor Dan/Atau Transshipment;
12. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-20/BC/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan Dan Cukai;
13. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2018 tentang Pelayanan Penyampaian Pemberitahuan Kepabeanan Dan/Atau Pemberitahuan Cukai Dalam Keadaan Kahar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2023 tentang Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-139/BC/2022 Tentang Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Pertama sampai dengan Tahap Kedelapanbelas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KESEMBILANBELAS.

KESATU : Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 adalah rangkaian kegiatan untuk menerapkan atau mengoperasikan aplikasi CEISA 4.0 dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses infrastruktur dan teknologi CEISA 4.0 secara penuh pada Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan.
2. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

KEDUA : Menetapkan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai dengan jenis layanan sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

- KETIGA : Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Jasa terkait, dan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 melalui koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KELIMA : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menugaskan Pejabat dan/atau Pegawai melakukan koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan dan evaluasi terhadap layanan selama penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 bersama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KEENAM : Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan CEISA 4.0 mengalami kondisi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tidak normal, layanan dapat dilakukan dengan menggunakan CEISA, aplikasi pendukung atau metode lain sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2025.
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:
- Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
 - Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-66/BC/2025
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0
TAHAP KESEMBILANBELAS

**DAFTAR KANTOR BEA DAN CUKAI YANG DITETAPKAN
MELAKUKAN PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0
TAHAP KESEMBILANBELAS**

No	Kantor	Jenis Layanan
1.	KPU BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
2.	KPU BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
3.	KPPBC TMP BELAWAN	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
4.	KPPBC TMP MERAK	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
5.	KPPBC TMP CIKARANG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
6.	KPPBC TMP TANJUNG PERAK	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
7.	KPPBC TMP NGURAH RAI	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
8.	KPPBC TMP A TANGERANG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
9.	KPPBC TMP A JAKARTA	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
10.	KPPBC TMP A MARUNDA	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
11.	KPPBC TMP A BOGOR	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)

No	Kantor	Jenis Layanan
12.	KPPBC TMP A BEKASI	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
13.	KPPBC TMP A PURWAKARTA	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
14.	KPPBC TMP A BANDUNG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
15.	KPPBC TMP A SEMARANG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
16.	KPPBC TMP A PASURUAN	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
17.	KPPBC TMP B MEDAN	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
18.	KPPBC TMP B PEKANBARU	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
19.	KPPBC TMP B DUMAI	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
20.	KPPBC TMP B TELUK BAYUR	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
21.	KPPBC TMP B PALEMBANG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
22.	KPPBC TMP B BANDAR LAMPUNG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
23.	KPPBC TMP B JAMBI	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
24.	KPPBC TMP B TANJUNGPINANG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
25.	KPPBC TMP B PONTIANAK	Validasi Lartas BC 3.3

No	Kantor	Jenis Layanan
		Perbendaharaan (Penagihan)
26.	KPPBC TMP B BALIKPAPAN	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
27.	KPPBC TMP B GRESIK	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
28.	KPPBC TMP B SIDOARJO	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
29.	KPPBC TMP C BANDA ACEH	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
30.	KPPBC TMP C LHOKSEUMAWE	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
31.	KPPBC TMP C KUALA TANJUNG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
32.	KPPBC TMP C PEMATANGSIANTAR	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
33.	KPPBC TMP C PANGKALPINANG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
34.	KPPBC TMP C BONTANG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
35.	KPPBC TMP C KOTABARU	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
36.	KPPBC TMP C MOROWALI	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
37.	KPPBC TMP C SORONG	Validasi Lartas BC 3.3
		Perbendaharaan (Penagihan)
38.	KANWIL DJBC SUMATERA UTARA	Perbendaharaan (Penagihan)
39.	KANWIL DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU	Perbendaharaan (Penagihan)

No	Kantor	Jenis Layanan
40.	KANWIL DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR	Perbendaharaan (Penagihan)
41.	KANWIL DJBC JAWA BARAT	Perbendaharaan (Penagihan)
42.	KANWIL DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA	Perbendaharaan (Penagihan)
43.	KANWIL DJBC JAWA TIMUR II	Perbendaharaan (Penagihan)
44.	KANWIL DJBC BALI, NTB DAN NTT	Perbendaharaan (Penagihan)
45.	KANWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT	Perbendaharaan (Penagihan)
46.	KANWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	Perbendaharaan (Penagihan)
47.	KANWIL DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN	Perbendaharaan (Penagihan)
48.	KANWIL DJBC MALUKU	Perbendaharaan (Penagihan)
49.	KANWIL DJBC ACEH	Perbendaharaan (Penagihan)
50.	KANWIL DJBC RIAU	Perbendaharaan (Penagihan)
51.	KANWIL DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT	Perbendaharaan (Penagihan)
52.	KANWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN SELATAN	Perbendaharaan (Penagihan)
53.	KANWIL DJBC SULAWESI BAGIAN UTARA	Perbendaharaan (Penagihan)
54.	KANWIL DJBC KHUSUS PAPUA	Perbendaharaan (Penagihan)
55.	KPPBC TMP C SABANG	Perbendaharaan (Penagihan)
56.	KPPBC TMP C FAKFAK	Perbendaharaan (Penagihan)
57.	KPPBC TMP C TUAL	Perbendaharaan (Penagihan)
58.	KPPBC TMP C JAGOI BABANG	Perbendaharaan (Penagihan)
59.	KPPBC TMP C MANOKWARI	Perbendaharaan (Penagihan)
60.	KPPBC TMP C LUWUK	Perbendaharaan (Penagihan)
61.	KPPBC TMP C MERAUKE	Perbendaharaan (Penagihan)
62.	KPPBC TMP C SIBOLGA	Perbendaharaan (Penagihan)
63.	KPPBC TMP C MALILI	Perbendaharaan (Penagihan)
64.	KPPBC TMP C LABUAN BAJO	Perbendaharaan (Penagihan)
65.	KPPBC TMP C GORONTALO	Perbendaharaan (Penagihan)
66.	KPPBC TMP C LANGSA	Perbendaharaan (Penagihan)

No	Kantor	Jenis Layanan
67.	KPPBC TMP C KETAPANG	Perbendaharaan (Penagihan)
68.	KPPBC TMP C BIAK	Perbendaharaan (Penagihan)
69.	KPPBC TMP C PALANGKARAYA	Perbendaharaan (Penagihan)
70.	KPPBC TMP C AMBON	Perbendaharaan (Penagihan)
71.	KPPBC TMP C KUPANG	Perbendaharaan (Penagihan)
72.	KPPBC TMP C BENGKULU	Perbendaharaan (Penagihan)
73.	KPPBC TMP C MEULABOH	Perbendaharaan (Penagihan)
74.	KPPBC TMP C TELUK NIBUNG	Perbendaharaan (Penagihan)
75.	KPPBC TMP B ATAMBUA	Perbendaharaan (Penagihan)
76.	KPPBC TMP C JAYAPURA	Perbendaharaan (Penagihan)
77.	KPPBC TMP C TANJUNGPANDAN	Perbendaharaan (Penagihan)
78.	KPPBC TMP C NANGA BADAU	Perbendaharaan (Penagihan)
79.	KPPBC TMP C PANGKALAN BUN	Perbendaharaan (Penagihan)
80.	KPPBC TMP C NUNUKAN	Perbendaharaan (Penagihan)
81.	KPPBC TMP C PANTOLOAN	Perbendaharaan (Penagihan)
82.	KPPBC TMP C BENGKALIS	Perbendaharaan (Penagihan)
83.	KPPBC TMP C SAMPIT	Perbendaharaan (Penagihan)
84.	KPPBC TMP C SUMBAWA	Perbendaharaan (Penagihan)
85.	KPPBC TMP C BANYUWANGI	Perbendaharaan (Penagihan)
86.	KPPBC TMP C TIMIKA	Perbendaharaan (Penagihan)
87.	KPPBC TMP C PAREPARE	Perbendaharaan (Penagihan)
88.	KPPBC TMP C TEMBILAHAN	Perbendaharaan (Penagihan)
89.	KPPBC TMP B TARAKAN	Perbendaharaan (Penagihan)
90.	KPPBC TMP C BITUNG	Perbendaharaan (Penagihan)
91.	KPPBC TMP C KENDARI	Perbendaharaan (Penagihan)
92.	KPPBC TMP C SANGATTA	Perbendaharaan (Penagihan)
93.	KPPBC TMP C PROBOLINGGO	Perbendaharaan (Penagihan)
94.	KPPBC TMP B TANJUNG BALAI KARIMUN	Perbendaharaan (Penagihan)

No	Kantor	Jenis Layanan
95.	KPPBC TMP C CILACAP	Perbendaharaan (Penagihan)
96.	KPPBC TMP B MAKASSAR	Perbendaharaan (Penagihan)
97.	KPPBC TMP B SAMARINDA	Perbendaharaan (Penagihan)
98.	KPPBC TMP B YOGYAKARTA	Perbendaharaan (Penagihan)
99.	KPPBC TMP C ENTIKONG	Perbendaharaan (Penagihan)
100.	KPPBC TMP TANJUNG EMAS	Perbendaharaan (Penagihan)
101.	KANWIL DJBC BANTEN	Perbendaharaan (Penagihan)
102.	KANWIL DJBC JAKARTA	Perbendaharaan (Penagihan)
103.	KANWIL DJBC JAWA TIMUR I	Perbendaharaan (Penagihan)
104.	KPPBC TMP A DENPASAR	Perbendaharaan (Penagihan)
105.	KPPBC TMP B BANJARMASIN	Perbendaharaan (Penagihan)
106.	KPPBC TMP B KUALANAMU	Perbendaharaan (Penagihan)
107.	KPPBC TMP B SURAKARTA	Perbendaharaan (Penagihan)
108.	KPPBC TMP C BLITAR	Perbendaharaan (Penagihan)
109.	KPPBC TMP C BOJONEGORO	Perbendaharaan (Penagihan)
110.	KPPBC TMP C CIREBON	Perbendaharaan (Penagihan)
111.	KPPBC TMP C JEMBER	Perbendaharaan (Penagihan)
112.	KPPBC TMP C MADIUN	Perbendaharaan (Penagihan)
113.	KPPBC TMP C MADURA	Perbendaharaan (Penagihan)
114.	KPPBC TMP C MAGELANG	Perbendaharaan (Penagihan)
115.	KPPBC TMP C MANADO	Perbendaharaan (Penagihan)
116.	KPPBC TMP C MATARAM	Perbendaharaan (Penagihan)
117.	KPPBC TMP C PURWOKERTO	Perbendaharaan (Penagihan)
118.	KPPBC TMP C SINTETE	Perbendaharaan (Penagihan)
119.	KPPBC TMP C TASIKMALAYA	Perbendaharaan (Penagihan)
120.	KPPBC TMP C TEGAL	Perbendaharaan (Penagihan)
121.	KPPBC TMP C TERNATE	Perbendaharaan (Penagihan)

No	Kantor	Jenis Layanan
122	KPPBC TMC KUDUS	Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
123	KPPBC TMC KEDIRI	Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
124	KPPBC TMC MALANG	Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
125	DIREKTORAT AUDIT	Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
126	KPPBC TMP JUANDA	Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
127	KPPBC TMP C KANTOR POS PASAR BARU	Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)
128	KPU BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK	Perbendaharaan (Billing, Jaminan, Piutang, Penagihan)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

